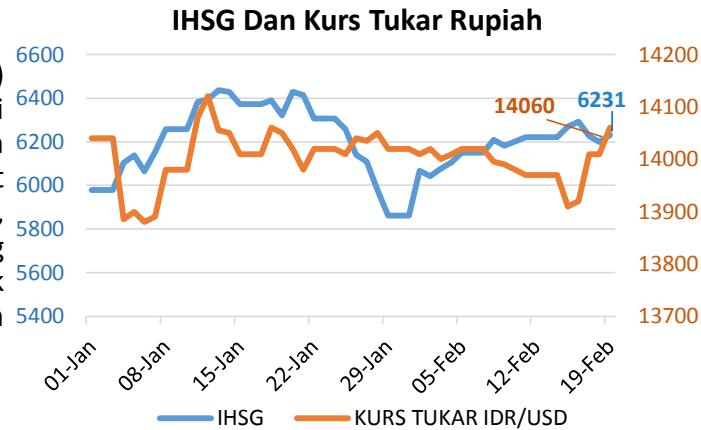


PERGERAKAN HARGA SAHAM DAN KURS TUKAR RUPIAH

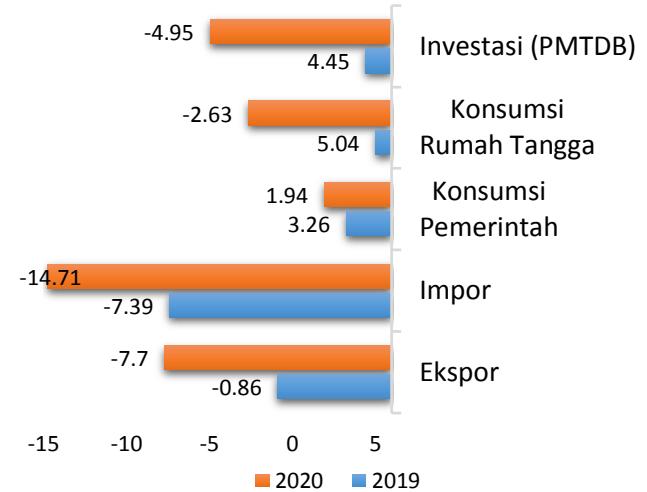
Pada pekan terakhir bulan Januari 2021, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi cukup dalam yang disebabkan oleh jumlah kasus Covid-19 yang telah mencapai angka satu juta, selain itu Amerika Serikat masih mempertahankan perang dagangnya dengan China. IHSG rebound memasuki pekan pertama bulan Februari, tren positif tersebut berlanjut hingga akhir pekan ketiga. Penguatan dipicu oleh sentimen positif neraca perdagangan, penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia dan pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil di kisaran Rp 14.000, kecenderungan tersebut disebabkan prospek pemulihan ekonomi dari Amerika Serikat yang memberikan dampak positif dan program vaksinasi di Indonesia.



BPS MERILIS PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Februari 2021 telah merilis data terbaru Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data terbaru, PDB Indonesia pada Triwulan IV tahun 2020 berkontraksi secara kumulatif di angka 2,07% dan secara *year-on-year* berkontraksi sebesar 2,19%. Angka ini diluar dari perkiraan beberapa lembaga dunia dan pemerintah Indonesia sendiri yang memprediksikan PDB Indonesia berkontraksi dikisaran 2,00% s.d 1,00%. Pertumbuhan perekonomian tahun 2020 jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2019 yang tumbuh 5,02% dampak dari pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi bahkan juga terjadi pada perekonomian dunia. Sektor impor menjadi faktor pembentuk PDB yang mengalami penurunan terbesar diangka -14,71% disebabkan oleh negara-negara yang membatasi dan/atau menutup perdagangan ekspor-impor sehingga mengganggu sisi *supply* dan *demand*. Sementara itu sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi sektor terbesar yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga -2,63% di tahun 2020. Menurunnya daya beli masyarakat disebabkan kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan uangnya, selain itu adanya pembatasan mobilitas juga menjadi penyebab berkontraksinya sektor konsumsi rumah tangga. Hampir semua komponen pembentuk PDB mengalami kontraksi, hanya sektor konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan di tahun 2020 yaitu sebesar 1,94%.

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (% (c-to-c))

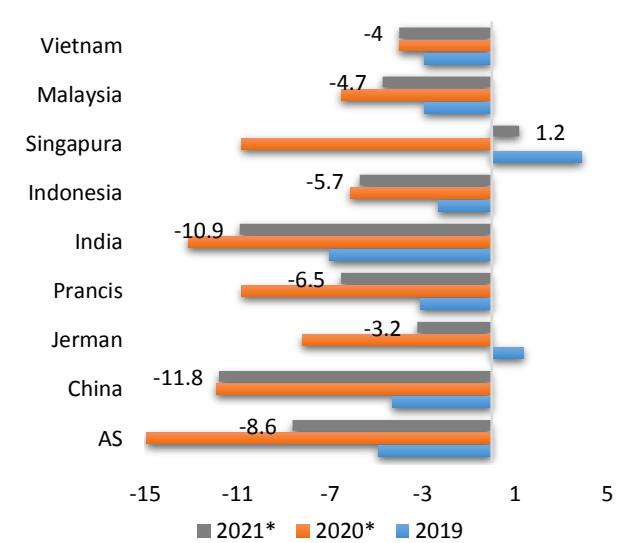


Sumber: BPS

UTANG PEMERINTAH TAHUN 2020 BERTAMBAH AKIBAT PANDEMI

Hutang pemerintah Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan penambahan utang sebesar Rp 1.296 T. Penambahan utang pemerintah tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang menimpa semua negara yang di dominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Perlu adanya stimulus dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga perekonomian negara ditengah tekanan yang besar. Pemerintah membutuhkan dana lebih untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia juga terjadi di berbagai negara yang terdampak pandemi Covid-19, bahkan rasio pelebaran defisit anggaran pemerintah dibandingkan dengan negara ASEAN dan G20 masih termasuk kategori yang paling rendah. Amerika Serikat misalnya, terjadi defisit hingga 14,90% dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,90%, China mengalami defisit 11,90% lebih dalam dari tahun 2019 defisit sebesar 4,30%. Besarnya pengeluaran tidak diikuti oleh pendapatan pemerintah, yaitu sektor pajak merupakan sektor yang paling besar memberikan pemasukkan bagi pemerintah. Namun pendapatan pajak menurun karena adanya penurunan pajak bagi perusahaan dan masyarakat. Setoran pajak pada tahun 2020 turun menjadi Rp 1.070 T dari sebelumnya Rp 1.322 T di tahun 2019.

Proyeksi Defisit Fiskal (% thd PDB)



*proyeksi

Sumber: Kemenkeu

SOVEREIGN WEALTH FUND INDONESIA BERNAMA INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY

Dalam rangka peningkatan investasi dan pengurangan utang, Indonesia baru saja membentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) atau dikenal dengan Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (LPI) dengan nama *Indonesia Investment Authority* (INA). Pemerintah telah menunjuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Dewan Pengawas dan menunjuk Ridha DM Wirakusumah sebagai Direktur Utama INA. Keduanya dipercaya untuk memimpin dalam pengawasan dan menjalankan SWF sesuai dengan tujuan pemerintah. INA merupakan wadah investasi dari luar negeri untuk pembangunan proyek dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan investasi aset finansial di pasar modal dan membantu percepatan pembangunan tanpa mengandalkan utang. INA diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan dari dalam maupun luar negeri. Meskipun baru membentuk SWF pada tahun 2021, pemerintah meyakini INA dapat mengejar ketertinggalan dan mendapat kepercayaan dunia. Beberapa negara telah lebih dulu memiliki SWF seperti Uni Emirat Arab, Norwegia, China, Singapura dan Kuwait. Bahkan negara-negara tersebut telah membentuk SWF sejak 30 tahun lalu.

INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY

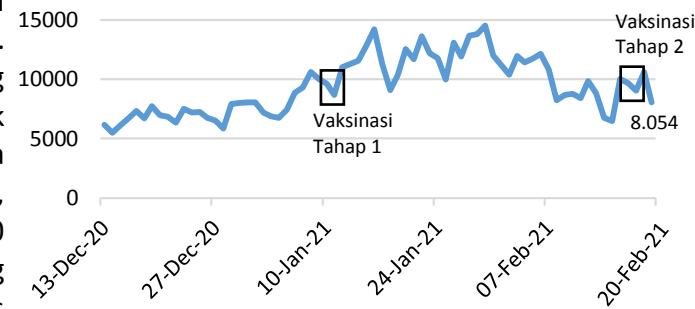
- Modal Awal 15 Triliun dari APBN, dan akan ada tambahan secara bertahap hingga mencapai 75 Triliun.
- Dana akan berasal dari berbagai sumber seperti: Penyertaan modal negara, dana tunai, barang milik negara, piutang negara dan saham negara.
- Wajib memberikan dividen sebesar 30% setiap tahun.
- Diutamakan akan membantu proyek infrastruktur.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

APAKAH PROGRAM VAKSINASI SUDAH SESUAI TARGET?

Sudah lebih dari satu bulan sejak 13 Januari 2021 program vaksinasi dilakukan, pada tahap 1 program ini ditujukan untuk Presiden, Menteri dan Tenaga Kesehatan dan tahap 2 program vaksinasi ditujukan untuk kelompok usia lanjut, petugas pelayanan publik dan aparat hukum. Upaya vaksinasi dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang ditargetkan pada tahun 2022 telah mencapai tujuannya. Pemerintah memberi target untuk mencapai kekebalan kolektif (*herd immunity*) sebanyak 60%-70% dari populasi Indonesia yang artinya setiap hari ada sekitar 480.000 dosis yang harus disuntikkan kepada masyarakat, namun hingga 20 Februari 2021 rata-rata harian jumlah vaksinasi berada di kisaran 50.000 dosis. Angka ini jauh dari target yang sudah direncanakan, namun pemerintah langsung bergerak cepat. Pemerintah telah mencanangkan strategi baru dari rata-rata 50.000 dosis perhari menjadi target 1 juta dosis setiap harinya dengan memprioritaskan pada klaster-klaster besar terutama pasar dan pusat perdagangan besar seperti Pasar Tanah Abang yang sudah melaksanakan vaksinasi pada 17 Februari lalu, sekaligus menjadi penanda dimulainya vaksinasi tahap 2 di Indonesia.

Jumlah Kasus Positif Covid-19 Indonesia



Sumber: Covid19.go.id

KEBIJAKAN BANK INDONESIA MERUBAH SUKU BUNGA ACUAN

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Februari 2021 memutuskan untuk menurunkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang masih terjaga. Berdasarkan data BPS, PDB Indonesia pada Desember 2020 secara kumulatif mengalami kontraksi diangka 2,07%. Terjadi perbaikan sektor ekspor pada kuartal IV, namun tidak diikuti oleh sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan sektor terbesar terhadap PDB. Pada Februari 2021 tingkat inflasi Indonesia diprediksi berada dikisaran 1,30% dan berada dibawah tingkat Inflasi di bulan sebelumnya sebesar 1,55%. Inflasi yang terjadi di bulan Februari 2021 disebabkan oleh komoditas dalam kelompok makanan, minuman dan tembakau.

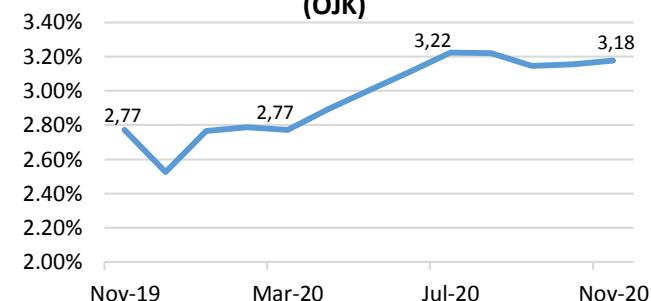
Key Rate	Jan-21	Feb-21
BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)	3,75%	3,50%
Suku Bunga Deposit Facility (DF)	3,00%	2,75%
Suku Bunga Lending Facility (LF)	4,50%	4,25%

Sumber: Bank Indonesia

KINERJA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan data terbaru Statistik Perbankan Indonesia per November 2020, OJK menilai kondisi industri perbankan tetap stabil dan terjaga kendati pandemi Covid-19 masih melanda. Hal ini ditandai dengan memadainya permodalan dan likuiditas perbankan yang tercermin dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan. Data OJK menyebutkan, CAR perbankan per November 2020 berada di posisi 24,25%, dan LDR perbankan berada di posisi 82,33%. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan dari bulan Oktober tahun 2020, peningkatan DPK juga berdampak pada rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan *Return On Assets* (ROA) sebesar 4,41% dan 1,64%.

Rasio NPL Bank Umum (OJK)



Sumber: OJK, Data diolah

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia juga direspon oleh perbankan dengan menurunkan bunga kredit investasinya. Pertumbuhan kredit perbankan mengalami kontraksi -2,4% di tahun 2020, sektor perdagangan besar dan industri pengolahan menjadi sektor yang mengalami kontraksi paling dalam. Selain lemahnya permintaan kredit dan selektifnya penyaluran kredit, faktor lainnya disebabkan banyaknya perusahaan yang pesimis terhadap prospek bisnisnya. Kedepannya pemerintah akan terus mendukung sektor-sektor kredit yang masih lamban pertumbuhannya dengan memberikan stimulus dan relaksasi pemerintah. Perbankan juga mengharapkan pemerintah untuk lebih memfokuskan *spending* pada sektor yang penyerapan tenaga kerja banyak, sektor yang memberikan efek domino positif, dan sektor yang mendukung terhadap peningkatan PDB Indonesia. Diperkirakan pertumbuhan kredit tahun 2021 akan tumbuh sekitar 7%, juga mempertimbangkan *Non-Performing Loan* (NPL) perbankan yang berada dikisaran 3% dan pertimbangan dari OJK terkait kebijakan stimulus.

Pemulihan Cepat (0-6 Bulan) %		
Sektor	Growth	Share
Telekomunikasi	10,61	4,56
Industri Makan & Minum	0,66	7,02
Jasa Kesehatan	15,33	1,36
Pendidikan	2,44	3,57
Energi & Air	6,04	1,17
Agrikultur & Peternakan	2,15	14,68
Pertambangan & Logam Dasar	9,23	1,69

Pemulihan Menengah (6-12 Bulan) %		
Sektor	Growth	Share
Transportasi Darat & Air	-8,6	3,88
Manufaktur	-4,53	19,86
Perdagangan Besar	-2,01	12,83
Konstruksi	-4,52	10,6
Pertambangan dan Penggalian kecuali bijih logam	-4,28	6,16

Pemulihan Lambat (> 12 Bulan) %		
Sektor	Growth	Share
Hotel & Restoran	-11,86	2,49
Transportasi Udara	-63,88	0,52
Real Estate	1,98	2,93
Bahan Bangunan	-9,11	0,56
Jasa Keuangan & Asuransi	-0,95	8,13

Sumber: Estimasi OCE BMRI

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyampaikan saat ini terjadi peningkatan pada plafond kredit yang tidak digunakan (*unused loan*) sebesar 30%, sementara nominal plafond yang diberikan terus meningkat. Begitu juga dengan kenaikan *new loan booking* yang tidak dapat mengimbangi laju *rundown* kredit, yang berakibat pertumbuhan kredit bank-bank swasta menjadi negatif. Sementara itu Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) di tahun 2020, bank-bank Syariah mampu bertahan berkat sistem *risk-sharing* yang lebih baik. Terjadi peningkatan di beberapa indikator seperti, pertumbuhan aset 9,85%, kredit 7,39% dan DPK sebesar 11,29%. Asbisindo meyakini di tahun 2021 pembiayaan bank-bank syariah akan meningkat hingga 9%, pencapaian itu dapat lebih lagi jika pemerintah memberikan stimulus keringanan pajak untuk UMKM.

TIM PENYUSUN

DIVISI MANAJEMEN RISIKO/TERINTEGRASI

Email

Website

skmr_t@victoriabank.co.id

www.victoriabank.co.id

Instagram

LinkedIn

bankvictoria

PT. Bank Victoria International, Tbk

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO